

RESHAPING GLOBAL SUPPLY CHAIN PASCA GEOPOLITIK : PELUANG INDONESIA DALAM TRADE DIVERSION GLOBAL

Dinda Najafah Ailah¹, Geryaldo Septiyadi Rahman², Julianti Soetarto³, Mutiara Fauzan⁴
Manajemen, Universitas Siber Asia, Jakarta
E-mail: samyutasajo54@gmail.com¹

ABSTRAK

Rekonfigurasi rantai pasok global dalam beberapa tahun terakhir menandai pergeseran paradigma dari orientasi efisiensi biaya menuju pendekatan berbasis ketahanan dan keamanan pasokan. Disrupsi pandemi COVID-19 serta meningkatnya rivalitas geopolitik antar kekuatan besar mendorong perusahaan multinasional melakukan diversifikasi lokasi produksi melalui strategi *China Plus One* dan *friend-shoring*. Dinamika tersebut menciptakan fenomena *trade diversion* yang membuka peluang strategis bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan kepemilikan mineral kritis—terutama nikel—serta posisi politik luar negeri yang relatif netral, Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat posisinya dalam *global value chain*. Namun, konversi peluang tersebut menjadi keuntungan struktural sangat bergantung pada kualitas institusi domestik, efisiensi logistik, serta konsistensi kebijakan industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan untuk menganalisis interaksi antara fragmentasi geopolitik global dan kesiapan domestik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi Indonesia dalam konfigurasi rantai pasok global baru tidak hanya ditentukan oleh keunggulan sumber daya, tetapi oleh kapasitas institusional dalam mengelola proses *industrial upgrading* secara berkelanjutan.

Kata kunci

FDI, Rantai Pasok Global, Geopolitik, Trade diversion

ABSTRACT

The reconfiguration of global supply chains in recent years has marked a paradigm shift from a cost-efficiency orientation to an approach based on resilience and supply security. The disruption of the COVID-19 pandemic and increasing geopolitical rivalry between major powers have encouraged multinational companies to diversify production locations through China Plus One and friend-shoring strategies. This dynamic has created a trade diversion phenomenon that opens up strategic opportunities for developing countries, including Indonesia. With its possession of critical minerals—especially nickel—and a relatively neutral foreign policy stance, Indonesia has the potential to strengthen its position in the global value chain. However, converting these opportunities into structural advantages depends heavily on the quality of domestic institutions, logistical efficiency, and consistent industrial policies. This study uses a qualitative approach based on literature to analyze the interaction between global geopolitical fragmentation and Indonesia's domestic preparedness. The results show that Indonesia's successful integration into the new global supply chain configuration is determined not only by its resource advantages but also by its institutional capacity to sustainably manage the industrial upgrading process.

Keywords

FDI, Global Supply Chain, Geopolitics, Trade Diversion

1. PENDAHULUAN

Globalisasi yang selama tiga dekade bertumpu pada efisiensi produksi lintas negara kini mengalami transformasi mendasar. Model *just-in-time* yang sebelumnya dipandang optimal justru memperlihatkan kerentanannya ketika pandemi COVID-19 dan eskalasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok mengganggu arus perdagangan internasional. Perusahaan multinasional mulai menyadari bahwa konsentrasi produksi pada satu wilayah menciptakan risiko sistemik yang tinggi.

Akibatnya, strategi korporasi global bergeser dari *cost minimization* menuju *risk diversification*. Konsep *friend-shoring* dan *China Plus One* menjadi respons terhadap meningkatnya fragmentasi geopolitik (IMF, 2023). Relokasi produksi kini mempertimbangkan stabilitas politik, kepastian hukum, serta akses terhadap sumber daya strategis, bukan semata biaya tenaga kerja murah.

Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi yang relatif strategis. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia (USGS, 2023), Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan transisi energi global (IEA, 2022). Selain itu, prinsip politik luar negeri bebas aktif memberikan fleksibilitas diplomatik dalam menjaga hubungan ekonomi dengan berbagai blok kekuatan global.

Namun, peluang eksternal tidak secara otomatis menghasilkan transformasi struktural. Literatur institusional menegaskan bahwa kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan domestik merupakan determinan utama keberhasilan integrasi dalam *global value chain* (North, 1990). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kesiapan domestik Indonesia dalam memanfaatkan momentum *trade diversion* akibat fragmentasi geopolitik global. Saat ini, dunia tengah mengalami perubahan fundamental dalam pola perdagangan internasional yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam menangkap peluang pasar baru. Indonesia telah beranjak dari sekadar penonton menjadi aktor penting dalam perundingan dagang global berkat penguasaan cadangan mineral kritis, khususnya nikel, yang menjadi elemen vital bagi transisi energi hijau dan industri kendaraan listrik masa depan. Dengan berpijak pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia memiliki fleksibilitas untuk terlibat dalam sistem perdagangan global tanpa harus terjebak dalam polarisasi konflik kekuatan besar. Momentum ini merupakan titik balik strategis bagi Indonesia untuk bertransformasi dari pengeksport bahan mentah menjadi pusat manufaktur bernilai tambah tinggi di kawasan Indo-Pasifik, yang pada akhirnya akan memperkuat kedaulatan dan daya saing ekonomi nasional di pasar global.

Menyambut momentum emas tersebut bukanlah perkara mudah yang bisa dicapai hanya dengan mengandalkan sumber daya alam saja. Meskipun terlihat sangat menjanjikan di atas kertas, kesepakatan nyata di lapangan masih dibayangi oleh sejumlah hambatan struktural dan sistemik. Posisi tawar Indonesia terus diuji oleh permasalahan birokrasi yang rumit, tingginya biaya logistik dalam negeri yang mengikis daya saing produk lokal, dan inkonsistensi peraturan yang seringkali menciptakan ketidakpastian bagi investor jangka panjang. Persaingan semakin ketat di tingkat regional Negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia benar-benar meningkatkan upaya mereka dengan menerapkan perizinan secara digital dan memperkuat pengaturan industri mereka untuk mengambil setiap peluang untuk memindahkan pabrik dari Tiongkok. Indonesia perlu meningkatkan kinerjanya, tidak hanya dalam hal memiliki cukup ruang, namun juga dalam memiliki sumber daya manusia terbaik dan lingkungan yang melek teknologi yang siap mendukung industri masa depan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi dengan mengintegrasikan dinamika fragmentasi geopolitik global ke dalam kerangka kesiapan domestik Indonesia. Berbeda dengan studi yang bersifat deskriptif mengenai relokasi industri, penelitian ini menekankan interaksi antara faktor geopolitik, kebijakan hilirisasi, dan kapasitas institusional sebagai determinan keberhasilan integrasi Indonesia dalam konfigurasi rantai pasok global baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup laporan resmi lembaga internasional (World Bank, WTO, UNCTAD, IMF), dokumen kebijakan nasional, serta literatur akademik terkait *global value chain* dan institusionalisme ekonomi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas diperkuat dengan triangulasi sumber (Patton, 2002).

2.1 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang bersumber dari data sekunder (studi kepustakaan) dengan sumber data yang didapat dari dokumen resmi seperti laporan tahunan dari berbagai lembaga (World Bank, WTO, dan UNCTAD). Lalu, dokumen regulasi terkait hilirisasi industri, undang-undang Cipta Kerja, dll,

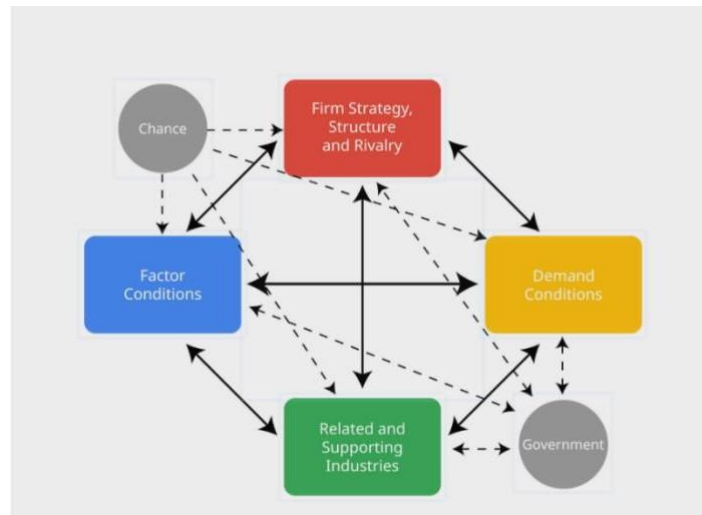
2.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap: reduksi data (pemilihan informasi relevan), penyajian data (organisasi tema seperti mineral kritis dan hambatan birokrasi), serta penarikan kesimpulan (sintesis peluang strategis). Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen kebijakan dan laporan riset independen (Patton, 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Geopolitik dan Pergeseran Paradigma Rantai Pasok Global

Perubahan drastis pada lanskap ekonomi politik global saat ini tidak lagi dapat dijelaskan secara memadai melalui teori keunggulan komparatif klasik. Analisis terhadap posisi Indonesia pasca-pergeseran geopolitik harus didekati menggunakan Teori Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*) yang dikembangkan oleh Michael Porter (1990). Melalui kerangka kerja Diamond Model, Porter berargumen bahwa daya saing suatu negara ditentukan oleh empat atribut utama: kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan.



Gambar 1. Empat Atribut Utama

Indonesia tidak lagi berada pada posisi semata sebagai pemilik sumber daya mentah, melainkan mulai mengonsolidasikan perannya sebagai pengendali komoditas strategis yang memiliki signifikansi tinggi dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor energi baru dan kendaraan listrik. Pergeseran ini tidak terlepas dari dinamika geopolitik yang berfungsi sebagai pendorong eksternal bagi perusahaan multinasional untuk mengevaluasi kembali struktur risiko operasional mereka. Ketegangan perdagangan dan pembatasan tarif antar kekuatan besar telah mendorong perusahaan mengurangi ketergantungan pada satu pusat produksi. Dalam kerangka strategi China Plus One, orientasi efisiensi biaya secara bertahap digantikan oleh prioritas pada keamanan pasokan dan diversifikasi lokasi produksi.

Fenomena relokasi tersebut dapat dijelaskan melalui Product Life Cycle Theory yang dikemukakan oleh Raymond Vernon (1966), di mana pada tahap kematangan industri—terutama ketika hambatan perdagangan meningkat di negara asal—perusahaan cenderung memindahkan fasilitas produksi ke negara berkembang yang menawarkan stabilitas politik, akses bahan baku, serta potensi pasar yang prospektif. Dengan demikian, pergeseran lokasi produksi bukan sekadar respons ekonomi, melainkan adaptasi strategis terhadap tekanan geopolitik global.

Dari perspektif Institusionalisme Ekonomi, posisi Indonesia juga dapat dianalisis melalui gagasan Douglas North (1990) mengenai pentingnya institusi sebagai “rules of the game” yang membentuk insentif dan menentukan besaran biaya transaksi. Stabilitas regulasi, kepastian hukum, serta konsistensi kebijakan menjadi faktor yang memengaruhi persepsi risiko investor. Arus investasi yang masuk melalui mekanisme friend-shoring mencerminkan adanya penilaian positif terhadap kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan diplomatik di tengah fragmentasi global. Prinsip politik luar negeri bebas aktif berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meminimalkan risiko politik bagi pelaku usaha internasional. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai lokasi produksi yang relatif aman dan stabil bagi perusahaan yang mencari diversifikasi dari wilayah dengan tingkat ketidakpastian geopolitik tinggi.

3.2 Friend-shoring dan Fragmentasi Ekonomi Global

Fenomena friend-shoring merupakan manifestasi nyata dari fragmentasi ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik. Konsep ini merujuk pada kecenderungan perusahaan multinasional untuk memindahkan basis produksi ke negara yang memiliki kedekatan politik, stabilitas institusional, serta hubungan diplomatik yang relatif harmonis. Laporan World Trade Report menunjukkan bahwa pasca perang dagang

Amerika Serikat–Tiongkok, pola perdagangan global mulai terpolarisasi ke dalam blok-blok ekonomi yang lebih kecil namun lebih terintegrasi secara politik.

Dalam konteks ini, Indonesia memperoleh keuntungan komparatif berupa posisi geopolitik yang netral serta keanggotaan aktif dalam berbagai forum multilateral. Keikutsertaan Indonesia dalam G20 dan ASEAN memperkuat persepsi stabilitas politik yang menjadi faktor penting dalam keputusan relokasi investasi. Hal ini tercermin pada peningkatan arus FDI ke sektor manufaktur berbasis sumber daya sejak implementasi kebijakan hilirisasi mineral strategi

3.3 Dampak Hilirisasi terhadap Struktur Ekspor Nasional

Struktur ekspor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perubahan komposisi yang cukup fundamental. Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah secara bertahap bergeser menuju peningkatan kontribusi produk setengah jadi dan manufaktur berbasis sumber daya alam. Implementasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel menjadi titik balik penting dalam transformasi tersebut. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, terjadi lonjakan nilai ekspor produk turunan seperti besi dan baja olahan, yang menunjukkan adanya proses peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Perubahan ini dapat dipahami sebagai bentuk industrial upgrading dalam kerangka global value chain, di mana Indonesia tidak lagi berada pada posisi paling hulu sebagai pemasok bahan baku, tetapi mulai mengambil peran pada tahapan pengolahan yang menghasilkan margin ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, restrukturisasi ekspor bukan sekadar fenomena statistik perdagangan, melainkan indikasi pergeseran posisi Indonesia dalam hierarki produksi global.

Di luar peningkatan nilai ekspor, kebijakan hilirisasi juga memunculkan dampak rambatan ekonomi (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor penunjang. Aktivitas pengolahan mineral mendorong pertumbuhan layanan logistik, pembangunan infrastruktur industri, serta ekspansi jasa keuangan yang mendukung pembiayaan proyek berskala besar. Selain itu, pengembangan kawasan industri berbasis smelter di wilayah luar Jawa berkontribusi terhadap terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Apabila didukung oleh konektivitas transportasi dan integrasi rantai pasok yang efisien, dinamika ini berpotensi mengurangi kesenjangan antarwilayah yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

ASEAN sebagai Arena Kompetisi Trade Diversion Persaingan memperebutkan relokasi industri global di kawasan ASEAN semakin intensif. Vietnam menonjol dalam sektor manufaktur ringan berorientasi ekspor karena integrasi kuat dalam jaringan perjanjian perdagangan bebas. Thailand mempertahankan keunggulan pada industri otomotif melalui ekosistem industri yang matang. Malaysia, di sisi lain, unggul pada sektor elektronik berteknologi tinggi.

Indonesia memiliki diferensiasi strategis berupa ketersediaan sumber daya alam dan pasar domestik yang besar. Namun, keunggulan tersebut hanya akan efektif jika didukung oleh reformasi institusional dan efisiensi logistik. Trade diversion bukan sekadar relokasi industri, melainkan kompetisi menyeluruh terkait kualitas regulasi, kesiapan tenaga kerja, dan integrasi infrastruktur.

3.4 Hilirisasi Mineral Kristis Sebagai Instrumen Leverage Strategis

Pembahasan mengenai hilirisasi nikel Indonesia sangat relevan jika dibedah menggunakan konsep Rantai Nilai Global (*Global Value Chain*) yang dikembangkan oleh Gary Gereffi (1994). Gereffi menekankan adanya proses *upgrading* atau peningkatan posisi dalam rantai nilai, dari sekadar penyedia bahan baku (*extractive*) menjadi manufaktur bernilai tambah tinggi. Indonesia melalui larangan ekspor bijih mentah nikel sedang melakukan apa yang disebut sebagai industrial upgrading.

Dengan memaksa pembangunan smelter dan pabrik prekursor baterai di dalam negeri, Indonesia tidak lagi berada pada posisi terbawah dalam kurva nilai tambah (*Smiling Curve theory*). Sebaliknya, Indonesia sedang mencoba mendaki menuju bagian tengah dan hulu industri teknologi tinggi. Data menunjukkan bahwa nilai ekspor produk turunan nikel meningkat secara signifikan dibandingkan saat Indonesia hanya mengeksport bijih mentah. Hal ini membuktikan bahwa intervensi negara melalui kebijakan industri dapat mengubah struktur ekonomi nasional secara fundamental, asalkan didukung oleh integrasi pasar yang kuat.

3.5 Birokrasi dan Teori Institusionalisme Ekonomi

Walaupun Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa kelimpahan sumber daya alam strategis, faktor tersebut tidak secara otomatis menjamin keberhasilan transformasi ekonomi. Literatur institusional menegaskan bahwa kualitas tata kelola merupakan determinan utama dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan. Dalam kerangka Institusionalisme Ekonomi, Douglas North (1990) menjelaskan bahwa institusi—sebagai seperangkat aturan formal maupun informal—membentuk struktur insentif dalam perekonomian dan memengaruhi perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh efektivitas “aturan main” yang mengatur interaksi ekonomi.

North juga menekankan pentingnya pengurangan transaction costs, yang mencakup efisiensi birokrasi, kepastian kontrak, serta perlindungan hak kepemilikan. Ketika biaya transaksi tinggi, risiko investasi meningkat dan keputusan penanaman modal menjadi lebih berhati-hati. Dalam konteks Indonesia, sejumlah hambatan administratif dan inkonsistensi regulasi masih berkontribusi pada tingginya biaya ekonomi non-produktif. Meskipun reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah bertujuan menyederhanakan prosedur investasi, implementasinya di tingkat teknis kerap menghadapi tantangan koordinasi antar-lembaga.

Dalam kompetisi menarik relokasi industri di kawasan ASEAN, perbandingan dengan Vietnam menunjukkan bahwa kepastian regulasi dan kecepatan pelayanan perizinan menjadi faktor diferensiasi penting. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional dan harmonisasi kebijakan menjadi agenda strategis agar arus modal yang masuk melalui fenomena trade diversion tidak bersifat oportunistik atau jangka pendek, melainkan berkembang menjadi investasi produktif yang berkelanjutan dan mendukung transformasi struktural ekonomi nasional.

3.6 Analisis Perbandingan : Paradoks Lokasi dan Infrastruktur

Dalam membandingkan posisi Indonesia dengan Vietnam dan Thailand, analisis tidak dapat berhenti pada ketersediaan sumber daya atau besaran pasar domestik semata. Perspektif Location Paradox dalam ekonomi internasional menjelaskan bahwa keunggulan faktor produksi dapat tereduksi apabila biaya distribusi dan koordinasi terlalu tinggi. Artinya, kelimpahan sumber daya tidak otomatis bertransformasi menjadi daya saing apabila sistem logistik dan konektivitas belum efisien.

Indikator Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis World Bank menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek efisiensi transportasi, kualitas infrastruktur, dan ketepatan waktu pengiriman dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Kondisi ini memengaruhi persepsi investor terhadap biaya operasional jangka panjang, terutama bagi industri yang bergantung pada arus bahan baku dan ekspor bernilai besar.

Secara domestik, konsentrasi aktivitas industri yang masih terpusat di Pulau Jawa turut menciptakan disparitas biaya logistik bagi wilayah lain. Industri yang beroperasi di luar Jawa sering menghadapi ongkos distribusi lebih tinggi akibat keterbatasan

konektivitas pelabuhan dan jaringan transportasi terpadu. Namun demikian, pembangunan infrastruktur dalam satu dekade terakhir—termasuk pengembangan pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri terintegrasi—mulai memperlihatkan dampak terhadap peningkatan konektivitas nasional.

Keunggulan potensial Indonesia terletak pada kemampuannya mengintegrasikan kawasan industri berbasis sumber daya dengan pelabuhan strategis dan suplai energi domestik. Jika efisiensi logistik terus diperbaiki dan dikombinasikan dengan strategi industrialisasi hijau, Indonesia berpeluang membangun diferensiasi kompetitif pada sektor manufaktur berbasis energi dan sumber daya alam, alih-alih bersaing langsung pada manufaktur ringan berbiaya rendah seperti Vietnam. Dengan demikian, daya saing Indonesia dapat diarahkan pada model produksi terintegrasi yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan.

ESG sebagai Standar Institusional Global Baru Di pasar global saat ini, perusahaan multinasional beroperasi di bawah tekanan publik untuk mematuhi standar keberlanjutan. Produk yang dihasilkan dari proses yang merusak lingkungan akan kehilangan izin berdagangnya di pasar global, terutama di Uni Eropa (melalui regulasi CBAM), Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan ambisi hilirisasi dengan standar hijau global. Penggunaan energi batu bara dalam smelter nikel menjadi titik lemah yang sering dikritik oleh pasar internasional. Oleh karena itu, percepatan transisi energi menuju energi terbarukan bukan lagi sekadar komitmen iklim, melainkan strategi bertahan dalam persaingan dagang. Negara yang mampu menawarkan "jalur produksi hijau" akan menjadi pemenang utama dalam gelombang trade diversion berikutnya. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi dan surya yang besar untuk mendukung visi industri hijau ini.

3. 7 Kesimpulan Analitis : Menuju Kedaulatan Ekonomi Baru

Rekonfigurasi perdagangan global akibat fragmentasi geopolitik merupakan momentum strategis yang relatif jarang terjadi dalam siklus ekonomi internasional. Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi yang potensial untuk memperkuat perannya dalam struktur produksi global. Jika dianalisis melalui kerangka Competitive Advantage Porter (1990) dan konsep industrial upgrading dalam Global Value Chain (Gereffi, 1994; 2018), kebijakan hilirisasi mencerminkan upaya sistematis untuk meningkatkan nilai tambah domestik serta memperbaiki posisi Indonesia dalam hierarki produksi internasional.

Namun demikian, perspektif Institusionalisme Ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh North (1990) mengingatkan bahwa ketersediaan sumber daya dan kebijakan industri tidak cukup tanpa dukungan institusi yang efektif. Reformasi birokrasi, konsistensi regulasi, serta kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam menciptakan lingkungan investasi yang kredibel. Tanpa penguatan struktur kelembagaan, potensi ekonomi yang bersumber dari mineral strategis berisiko tidak terkonversi menjadi transformasi struktural jangka panjang.

Ke depan, kapasitas Indonesia dalam menurunkan biaya transaksi domestik, meningkatkan efisiensi sistem logistik, dan mengintegrasikan standar keberlanjutan (ESG) ke dalam kebijakan industri akan menjadi faktor penentu daya saing. Apabila reformasi tersebut dilaksanakan secara konsisten, Indonesia tidak hanya berpeluang memanfaatkan dinamika trade diversion, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih resilien dan terdiversifikasi di kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia tidak semata ditentukan oleh momentum eksternal, melainkan oleh kemampuan internal dalam melakukan konsolidasi institusional dan transformasi struktural secara berkelanjutan.

3.8 Implikasi Kebijakan dan Agenda Reformasi Struktural

Perubahan konfigurasi perdagangan internasional akibat meningkatnya fragmentasi geopolitik dapat dipahami sebagai fase transisional dalam dinamika ekonomi global yang jarang terjadi. Momentum ini membuka ruang bagi negara berkembang untuk melakukan reposisi dalam jaringan produksi internasional. Dalam konteks Indonesia, peluang tersebut relevan jika dianalisis melalui kerangka Competitive Advantage yang dikemukakan Porter (1990), di mana daya saing nasional dibentuk oleh interaksi antara kondisi faktor, struktur industri, serta strategi kebijakan. Selaras dengan itu, konsep industrial upgrading dalam literatur Global Value Chain (Gereffi, 1994; 2018) menjelaskan bahwa peningkatan posisi dalam rantai nilai memerlukan pergeseran dari aktivitas ekstraktif menuju tahapan produksi bernilai tambah lebih tinggi. Kebijakan hilirisasi dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pergeseran tersebut dan memperkuat kontribusi manufaktur berbasis sumber daya terhadap struktur ekspor nasional.

Meskipun demikian, pendekatan Institusionalisme Ekonomi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi struktural tidak hanya bergantung pada desain kebijakan industri atau kelimpahan komoditas strategis. North (1990) menekankan bahwa institusi—baik formal maupun informal—membentuk kerangka insentif yang menentukan efisiensi ekonomi melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan kepastian kontraktual. Tanpa tata kelola yang kredibel, reformasi industri berisiko menghasilkan ketidakpastian baru yang justru menghambat akumulasi investasi jangka panjang. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, harmonisasi regulasi, dan penguatan supremasi hukum merupakan prasyarat mendasar dalam membangun kepercayaan investor.

Ke depan, daya saing Indonesia dalam memanfaatkan dinamika trade diversion akan sangat ditentukan oleh konsistensi reformasi domestik. Penurunan biaya transaksi, peningkatan kualitas infrastruktur logistik, serta integrasi standar keberlanjutan (ESG) dalam strategi industrialisasi akan menjadi faktor pembeda dalam kompetisi regional. Apabila transformasi tersebut berjalan secara berkelanjutan, Indonesia berpotensi tidak hanya menjadi lokasi alternatif relokasi industri, tetapi juga mengembangkan struktur ekonomi yang lebih resilien, terdiversifikasi, dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia tidak semata ditentukan oleh perubahan eksternal dalam tatanan geopolitik, melainkan oleh kapasitas internal dalam melakukan konsolidasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pembangunan ekonomi secara sistematis.

3.9 Data Empiris

a. Pergeseran FDI manufaktur ASEAN

Negara	Tren FDI Manufaktur	Faktor Pendorong
Vietnam	Meningkat signifikan	China+1 strategy
Thailand	Stabil	Basis otomotif
Malaysia	Moderat	Infrastruktur matang
Indonesia	Fluktuatif namun potensial	Hilirisasi & pasar domestik

Sumber: UNCTAD World Investment Report (2023–2024)

b. Biaya Logistik (%GDP)

Negara	Biaya Logistik	Implikasi
Indonesia	±23%	Hambatan daya saing

Vietnam	±16%	Lebih kompetitif
Malaysia	±13%	Infrastruktur matang

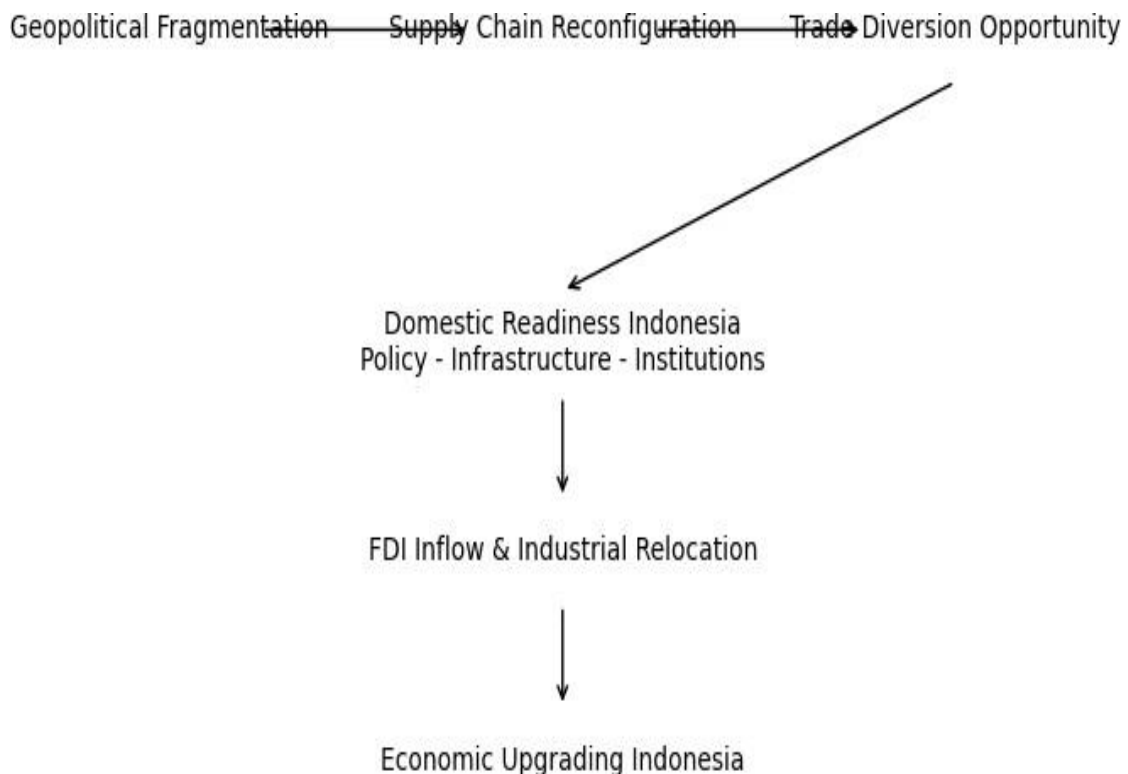
Sumber: World Bank Logistics Performance Index

c. Kontribusi Mineral Strategis Indonesia

Komoditas	Posisi Global	Relevansi Supply Chain
Nikel	Top producer	EV battery supply chain
Bauksit	Signifikan	Aluminium industry
Tembaga	Besar	Elektronik & energi

Sumber: IMF & USGS mineral data

3. 10 Kerangka Konseptual



Penelitian ini memposisikan fragmentasi geopolitik sebagai variabel eksogen yang memicu rekonfigurasi rantai pasok global. Proses tersebut menghasilkan peluang trade diversion yang hanya dapat dimanfaatkan apabila negara tujuan memiliki kesiapan domestik memadai. Dalam konteks Indonesia, kesiapan tersebut direpresentasikan melalui kebijakan hilirisasi, kualitas infrastruktur logistik, dan kapasitas institusional. Interaksi ketiga faktor ini menentukan keberhasilan Indonesia dalam menarik relokasi industri dan meningkatkan posisi dalam global value chain.

4. KESIMPULAN

Fragmentasi geopolitik global telah memicu rekonfigurasi rantai pasok internasional yang membuka peluang trade diversion bagi negara berkembang. Indonesia memiliki modal strategis berupa mineral kritis dan kebijakan hilirisasi yang progresif. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa peluang eksternal hanya menjadi

titik awal.

Keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kualitas institusi domestik, efisiensi logistik, konsistensi kebijakan industri, serta kemampuan memenuhi standar keberlanjutan global. Dengan reformasi struktural yang berkelanjutan, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya dalam jaringan produksi global dan membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh.

Namun, keberhasilan memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kualitas institusi, efisiensi logistik, serta kesiapan memenuhi standar keberlanjutan global. Reformasi struktural yang berkelanjutan diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi tujuan relokasi industri, tetapi juga mampu membangun basis industri berdaya saing tinggi dalam jangka panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa fragmentasi geopolitik telah mendorong transformasi mendasar dalam struktur rantai pasok global, yang membuka peluang trade diversion bagi negara berkembang. Indonesia memiliki keunggulan komparatif melalui sumber daya mineral strategis dan agenda hilirisasi industri, namun efektivitas pemanfaatan peluang tersebut bergantung pada kesiapan domestik. Tantangan utama mencakup biaya logistik yang tinggi, kompleksitas regulasi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas institusional. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara dinamika geopolitik dan faktor domestik dalam menjelaskan pergeseran global value chain. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian menekankan urgensi reformasi logistik, konsistensi kebijakan industri, dan penguatan tata kelola investasi guna memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan produksi global yang terus berevolusi. Implikasi Kebijakan sebagai berikut ini:

- a. Pengembangan green supply chain
- b. Diplomasi ekonomi strategis
- c. Digitalisasi dan harmonisasi regulasi investasi
- d. Integrasi kawasan industri dengan pelabuhan strategis
- e. Penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri
- f. Integrasi kebijakan hilirisasi dengan strategi energi hijau
- g. Diplomasi ekonomi aktif dalam forum multilateral

5. DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence*. Harvard University Press.
- Gereffi, G. (1994; 2018). *Global Value Chains*. Cambridge University Press.
- IEA. (2022). *Critical Minerals in Clean Energy Transitions*.
- IMF. (2023). *Goeconomic fragmentation and the future of multilateralism*. International Monetary Fund.
- IMF. (2023). *Goeconomic Fragmentation Report*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*.
- Rodrik, D. (2016). *Premature Deindustrialization*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta.
- UNCTAD. (2024). *World Investment Report*.
- UNCTAD. (2024). *World Investment Report: International Tax Reforms and Sustainable*

- Investment. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- USGS. (2023). Mineral Commodity Summaries.
- World Bank. (2023). Logistics Performance Index.
- World Bank. (2023). Logistics Performance Index: Connecting to Compete. Washington, DC: World Bank Group.
- World Trade Organization (WTO). (2025). World Trade Report: Reshaping Global Supply Chains. Geneva: WTO Secretariat.
- WTO. (2025). World Trade Report.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gereffi, G. (2018). Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism. Cambridge University Press.